

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia adalah kemiskinan. Dari tahun ke tahun masalah ini terus menerus belum dapat terselesaikan, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997. Kemiskinan sering kali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan, semata-mata kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang tidak mencakup aspek ekonomi saja akan tetapi juga dimensi sosial budaya dan dimensi struktural atau politik. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang memiliki beban cukup berat dalam pembangunan yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.

Masalah kemiskinan tentu saja tidak dapat dilepaskan dari penyebab kemiskinan tersebut, atau dengan kata lain kita harus mencari akar dan sumber kemiskinan itu. Bagaimana mungkin kita bisa menghilangkan kemiskinan kalau ternyata kita tidak tahu sumber dan akarnya. Mencari sumber kemiskinan bukanlah hal yang mudah, walaupun ilmu pengetahuan dewasa ini begitu maju, konsep kemiskinan telah dibuat namun tetap saja sumber dan akar kemiskinan belum dapat diketahui dengan jelas. Kehidupan masyarakat miskin nyaris tidak mengalami perubahan, kondisi tersebut barangkali disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Kebijakan selama ini cenderung bersifat sektoral, prosedural yang terlalu berbelit-belit dan kurang memperhatikan kondisi-kondisi yang ada dalam komunitas, sehingga sering terjadi tidak relevannya program-

program dengan kompleksitas persoalan kemiskinan tersebut (Jurnal Difha Aulia Lutfi tentang Kemiskinan Dan Upaya Pengentasan Kemiskinan). Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan masalah yang mengglobal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,22%) dari jumlah penduduk Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96%). (Online). <http://bps.go.id/brs/view/1158>. Diakses 15 Sept 2015-Data Sensus. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada September 2015 sebanyak 1.508.140 orang (10,79%). Angka tersebut bertambah sebanyak 44.470 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di bulan Maret 2015 yang berjumlah 1.463.670 orang (10,53%), itu menunjukkan bahwa pada periode Maret hingga September 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan cenderung meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,649 pada Maret 2015 menjadi 1,893 pada September 2015 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,421 pada Maret 2015 menjadi 0,521 pada September 2015. Kecenderungan yang semakin meningkat itu disebabkan berbagai faktor yang pada dasarnya ada dua faktor penting, seperti diutarakan di bawah ini:

Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk

pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen.

Kedua, yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Beberapa upaya dari pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan yaitu meluncurkan salah satu program penanggulangan kemiskinan berupa program kompensasi pengurangan subsidi BBM dengan memberikan Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin, sebagaimana ditetapkan dalam intruksi presiden nomor 12 tahun 2005 tanggal 10 september 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin. Program ini sangat menarik untuk menjadi kajian, dimana bentuk penanggulangan dari program ini menitik beratkan kepada bantuan langsung uang tunai kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil pendataan BPS yang proses pendataannya hanya dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dari proses waktu pendataan rumah tangga miskin sampai dengan penyerahan uang tunai ke masyarakat seperti program ini “tergesa-gesa” dilakukan oleh pemerintah, dimana sebagai alasan pembenar dari pemerintah atas kenaikan BBM.

Dari beberapa program penanggulangan kemiskinan, kiranya program Subsidi Langsung Tunai merupakan program yang secara konseptual sangat jelek yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa adanya tujuan yang jelas, sasaran dan tindak lanjut dari program Subsidi Langsung Tunai (SLT), menjadikan program ini seperti “obat penenang” disaat masyarakat marah akan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri.

Salah satu indikator majunya suatu pembangunan ekonomi adalah dengan melihat peningkatan pendapatan perkapita yang mana pendapatan perkapita itu sendiri adalah suatu gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara dan juga merupakan hasil pembagian antara pendapatan seluruh penduduk suatu daerah atau negara yang bersangkutan. Artinya semakin banyak jumlah penduduk yang diiringi dengan kesempatan kerja yang tinggi, pendapatan perkapita juga akan meningkat. Menurut Badan Statistik Pendapatan perkapita Sumatera Utara pada tahun 2011 Rp.27.487.046.94 sedangkan pendapatan perkapita di Kabupaten Deli Serdang tahun 2011 Rp.24.458.632.

Kesejahteraan suatu keluarga selalu didukung oleh pendapatan keluarganya. Pendapatan keluarga merupakan hasil yang diperoleh anggota keluarga setelah melakukan usaha, yang semuanya tidak terlepas dari adanya mata pencaharian atau lebih lazim disebut dengan pekerjaan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga atau anggota keluarga.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2014 maka penduduk kecamatan Percut Sei Tuan 26.243 jiwa, yang bermata pencaharian sebagai buruh 7.456 orang, jumlah penduduk dengan usia pekerja (17-59 tahun) 5.123 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2014). Pendapatan

keluarga tidak terpenuhi karena umumnya kepala keluarga bekerja sebagai nelayan, petani, pemulung, dan lain-lain. Pendapatan yang diperoleh warga masyarakat Rp.120.000,- per minggu atau bila disetarakan dengan pengeluaran per bulannya adalah Rp.480.000,- per rumah tangga per bulan. dan kadang kala tidak bekerja karena habis kontrak atau dengan alasan lain. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak keluarga belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, salah satunya keluarga yang masih dalam tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya, seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu instansi pemerintah yang memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat. Program KB adalah sebagai salah satu program strategis yang memutus angka kemiskinan dengan beberapa faktor seperti pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan kelestarian lingkungan. Dikatakan bahwa tujuan Pemerintah untuk menyelenggarakan program keluarga berencana adalah agar keluarga kecil yang terbentuk dapat meningkatkan kualitasnya serta hidup layak dan sejahtera. Upaya yang dilakukan secara langsung adalah memberi kesempatan

kepada masyarakat, terutama keluarga miskin (Pra S & KS I) untuk meningkatkan tahapan kesejahteraan mereka melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Gerbang Gajah) pada prinsipnya adalah gerakan untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat baik fisik maupun non fisik. Sebuah keluarga dikatakan sejahtera atau tidak miskin apabila keluarga tersebut dapat melaksanakan delapan fungsi keluarga secara optimal. Kedelapan fungsi keluarga tersebut menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Bab II Pasal 7 Ayat (2) adalah sebagai berikut: fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pemeliharaan lingkungan. UU No.10/1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga.

Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1994 pasal 2, menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga dan keluarga berencana yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Yang bertujuan mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, produktif, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungan.

Berkaitan dengan uraian tersebut, pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian

nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. Perlu ditumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pokok-pokok kegiatan pembangunan keluarga sejahtera yang dilakukan di Kampung KB antara lain: (1) Pembinaan ketahanan fisik keluarga. Kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan ketahanan fisik keluarga yaitu: pembinaan gizi keluarga termasuk gizi ibu hamil, stimulasi pertumbuhan balita, pembinaan kesehatan lingkungan keluarga, usaha tanaman obat keluarga, dan lain-lain, (2) Pembinaan ketahanan non fisik keluarga. Kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan ketahanan non fisik keluarga yaitu: pembinaan kesehatan mental keluarga, stimulasi perkembangan balita, konseling keluarga, dan lain-lain.

Dalam Inpres No.3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan menekankan perlunya usaha terpadu dan menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga terutama keluarga yang masih dalam tahap Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1), agar dapat diberdayakan melalui pengembangan kegiatan kewirausahaan melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk meningkatkan pendapatannya.

Kecamatan Percut Sei Tuan terdiri dari 22 Desa/Kelurahan dengan 405.570 KK (*Sumber: Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Tahun 2015*),

salah satu Desa yang saya teliti di Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu Desa Percut memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 3330 KK. Di Desa Percut masih terdapat keluarga Pra sejahtera yaitu 22 KK, dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 1037 KK (Hasil pendataan keluarga tingkat Desa/Kelurahan tahun 2015). Di Desa Percut memiliki Kampung KB yang terdiri dari enam Dusun yaitu Dusun 13, 14, 15, 16, 17, 18 dibentuk pada tahun 2015, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 336 KK.

Defenisi Kampung KB pada “Kamus Istilah Kependudukan dan KB” yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) pada tahun 2011:53: “Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas”.

Berdasarkan data dari kampung KB, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan yaitu: Masih banyak jumlah masyarakat yang tergolong dalam keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, Rendahnya pendapatan Kepala Keluarga, Jumlah tanggungan keluarga yang cukup besar, Pekerjaan suami yang tidak tetap, Pendidikan masyarakat masih rendah dan Rendahnya fasilitas kesehatan dalam bidang KB seperti tenaga medis sangat terbatas dan peralatan kurang memadai, puskesmas yang jauh dari desa tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kampung KB, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan diantaranya berikut ini:

1. Masih banyak jumlah masyarakat yang tergolong dalam keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
2. Rendahnya pendapatan Kepala Keluarga di Kampung KB.
3. Jumlah tanggungan keluarga yang cukup besar.
4. Pendidikan masyarakat masih rendah.
5. Rendahnya fasilitas kesehatan dalam bidang KB.

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memudahkan peneliti dan untuk menghindari keliruan dalam penulisan, maka diperlukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah **“Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kampung KB, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kampung KB, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan?”.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan “Untuk mengetahui Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kampung KB, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan”.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial di bidang Menanggulangi Kemiskinan Melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi warga Kampung KB tentang Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kampung KB, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan.
- b. Sebagai bahan masukan kepada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dalam bidang Menanggulangi Kemiskinan Melalui Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Sebagai bahan masukan/referensi bagi peneliti lain.